

II. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Jensen dan Meckling, 1976 dalam Fivi dan Ira, 2008 menyatakan teori agensi sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) yang menyewa orang-orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi menganggap bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal dianggap hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif.

Perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan prinsipal akan timbul manakala prinsipal tidak dapat dengan mudah memantau tindakan agen. Karena prinsipal tidak memiliki informasi

yang mencukupi mengenai kinerja agen, principal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan. Situasi yang demikian disebut sebagai asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati (2010) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan atau pemegang saham yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan pemilik, dalam hal ini terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Secara garis besar, Jensen dan Meckling menggambarkan dua bentuk keagenan yaitu antara manajer dengan pemilik dan antara manajer dengan pemberi pinjaman (*bondholders*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mengumumkan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

2.2 Corporate Governance

2.2.1 Pengertian Corporate Governance

Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Pengertian ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Secara singkat *corporate governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan.

2.2.2 Prinsip-prinsip GCG

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik ini menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (CG) dalam proses manajerial perusahaan. Ada lima unsur penting dalam *corporate governance* yang merupakan prinsip-prinsip dalam *corporate governance*, yaitu:

a) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas

keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

b) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan.

c) Keterbukaan (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

d) Keadilan (*Fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

e) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

2.2.3. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Tujuan dari *corporate governance* di antaranya agar para pemegang saham dapat memperoleh haknya untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders*.

Sedangkan manfaat dari pelaksanaan *corporate governance* di antaranya:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya.
4. Meningkatkan kinerja perusahaan yang dilihat dari meningkatnya *stakeholders value* dan deviden bagi pemegang saham. Juga dapat meningkatkan penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

2.3 Komisaris Independen

2.3.1 Pengertian Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance (transparency, accountability, responsibility, fairness)*. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga "*fairness*" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya sekaligus "*the interest of the whole company*". Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Wardhani, 2008).

2.3.2 Tanggungjawab komisaris independen

Komisaris independen memiliki tanggungjawan pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Dikutip dari Pedoman Tentang Komisaris Independen, dalam upaya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik maka komisaris independen harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dapat memberikan nasihat kepada direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer profesional.

- c. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
- d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.
- e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.diterapkan dengan baik.

2.3.3 Wewenang komisaris independen

1. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam 'berita acara rapat dewan komisaris' dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004). Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi pemantauan dari dewan dalam perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007) sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan secara tidak langsung dapat menuntut adanya

informasi yang transparan dari pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional ini maka semakin besar pula pemantauan yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya informasi yang transparan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka dapat mendorong pihak manajemen perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif.

2.5 *Leverage*

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajer, pemegang saham dan kreditor mungkin terjadi konflik kepentingan ketika perusahaan menggunakan hutang sebagai salah satu sumber pendanaannya. Konflik tersebut tercermin dari kebijakan dividen, kebijakan investasi serta penambahan hutang baru (Juanda, 2007). Ketiga kebijakan tersebut dapat digunakan pemegang saham untuk mengatur manajemen dan mentransfer kekayaan dari tangan kreditor. Sementara itu pihak kreditor mempunyai kepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi dirinya di masa mendatang.

Pada perusahaan yang mempunyai hutang relatif tinggi, kreditor mempunyai hak lebih besar untuk mengetahui dan mengawasi penyelenggaraan operasi dan akuntansi perusahaan. Hak lebih besar yang dimiliki kreditor akan mengurangi asimetri informasi di antara kreditor dengan manajer perusahaan. Manajer mengalami kesulitan untuk menyembunyikan informasi dari kreditor. Kreditor berkepentingan terhadap distribusi aktiva bersih dan laba yang lebih rendah kepada manajer dan pemegang saham sehingga kreditor cenderung meminta manajer untuk menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005 dalam Rahmawati, 2010). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat hutang atau *leverage* suatu perusahaan, maka permintaan akan penerapan

akuntansi yang konservatif semakin tinggi pula karena disini kreditor berkepentingan terhadap keamanan dananya yang diharapkan menguntungkan bagi dirinya.

Biasanya, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Oleh karena itu, tidak hanya kreditor saja yang dapat mengawasi aktivitas perusahaan, tetapi mekanisme *corporate governance* juga ikut berperan dalam mengawasi penggunaan dana dari kreditor oleh pihak manajemen perusahaan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini karena semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007).

2.6 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Suatu perusahaan yang besar sangat lebih sensitif daripada perusahaan yang kecil. Salah satu pemicu manajer untuk melakukan penurunan laba (Almilia, 2004). Hal ini dikarenakan untuk meminimalkan risiko politik berupa biaya-biaya politis. Biaya politis mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, dan sebagainya (Almilia, 2004). Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat biaya politis yang dihadapi perusahaan sehingga akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif (Wardhani, 2008). Yang dimaksud biaya politis di sini adalah pajak yang dikenakan perusahaan oleh pemerintah karena

semakin besar ukuran perusahaan, maka pajak yang ditanggung semakin besar pula sehingga hal ini akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif pula.

Perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan berukuran besar mempunyai laba tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah akan terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar akan cenderung melaporkan laba rendah secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif (Lo, 2005 dalam Rahmawati, 2010). Dengan demikian maka laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil sehingga pajak yang harus dibayar semakin kecil pula.

2.7 Konservatisme Akuntansi

2.7.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews* (Lara, et al., 2005).

Ketidakpastian dan risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki. Pelaporan yang didasari kehati-hatian akan memberi manfaat yang terbaik untuk semua pemakai laporan keuangan. Konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup

dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aset. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004). Konservatisme merupakan antisipasi terhadap kerugian daripada laba. Menurut Watts (2003) dalam Kiryanto dan Supriyanto (2006), mengantisipasi laba berarti mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang dan sebaliknya tidak mengantisipasi laba berarti belum mencatat laba sebelum ada klaim secara hukum dihubungkan dengan aliran kas dimasa yang akan datang.

2.7.2 Manfaat Konservatisme Akuntansi

Kontroversi mengenai manfaat angka-angka akuntansi yang konservatif belum juga mendapatkan jalan tengahnya. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat. Tetapi ada juga pendapat yang menentangnya dan beranggapan bahwa konservatisme akuntansi tidak bermanfaat karena mengandung informasi yang bias.

a. Akuntansi Konservatif Tidak Bermanfaat

Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar laporan keuangan di Amerika Serikat, namun beberapa peneliti masih meragukan manfaat konservatisme tersebut. Stabus (1995) dalam Mayangsari dan Wilopo (2002) berpendapat adanya berbagai cara untuk mengartikan dan menginterpretasikan konservatisme merupakan kelemahan konservatisme. Disamping itu, konservatisme dianggap sebagai suatu sistem akuntansi yang bias. Pendapat ini dipicu oleh pengertian mengenai konservatisme itu sendiri yang disampaikan oleh

beberapa peneliti terdahulu, dimana akuntansi yang mengakui kerugian lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan, serta menilai aktiva dengan nilai terendah dan kewajiban dengan nilai tertinggi.

b. Akuntansi Konservatif Bermanfaat

Akuntansi konservatif tetap disarankan untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat dalam aturan-aturan yang ada dalam standar akuntansi yang ada di Indonesia (PSAK). Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesar-besarkan laba (manajemen laba) serta memanfaatkan informasi yang asimetri sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan para pemegang saham (*agency conflict*). Para peneliti menyebutkan telah terjadi peningkatan konservatisme standar akuntansi secara global. Peningkatan itu disebabkan oleh meningkatnya tuntutan hukum, sehingga auditor dan manajer cenderung melindungi dirinya dengan selalu melaporkan angka-angka yang konservatif di dalam laporan keuangannya (Givoly dan Hayn, 2002 dalam Mayangsari dan Wilopo, 2002). Berdasarkan kontrak yang efisien, konservatisme akuntansi menyatakan bahwa besarnya laba yang diantisipasi merupakan fungsi langsung dari kemampuan perusahaan dalam mengestimasi laba perusahaan dalam masa mendatang. Secara intuitif, prinsip konservatisme ini bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksikan kondisi pada masa mendatang. Dengan kata lain, pemilihan suatu metode yang mendukung prinsip konservatisme memiliki *value relevance*. Logika ini dapat membantah kritik terhadap ketidakbergunaan laporan keuangan yang berdasarkan pada prinsip konservatisme (Mayangsari dan Wilopo, 2002).

2.7.3 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Para peneliti biasanya menggunakan tiga bentuk pengukuran untuk menyatakan konservatisme, yaitu (Watts, 2003b):

a. *Net asset measures*

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui konservatisme laporan keuangan seperti yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) adalah nilai aset yang *understatement* dan kewajiban yang *overstatement*. Proksi pengukuran ini menggunakan rasio *market to book value of equity* yang mencerminkan nilai pasar ekuitas relatif terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. *Book value* dihitung menggunakan nilai ekuitas pada tanggal neraca yaitu tanggal 31 Desember dan *Market value* diukur menggunakan harga penutupan saham pada tanggal pengumuman agar dapat merefleksi respon pasar atas laporan keuangan (Fala, 2007). Rasio yang bernilai > 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Dewi, 2004).

b. *Earnings/accrual measure*

Pada tipe ini, konservatisme diukur dengan menggunakan akrual, yaitu selisih antara laba bersih dengan arus kas. Pengukuran konservatisme ini dilakukan oleh Dewi (2004) dan Sari (2004), yaitu:

$$Cit = NIit - CFit$$

Cit : tingkat konservatisme perusahaan i pada waktu t

NIit : laba bersih sebelum *extraordinary item* ditambah depresiasi dan

amortisasi

CFit : arus kas dari kegiatan operasi

Semakin kecil ukuran akrual suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin menerapkan prinsip akuntansi yang konservatis.

c. *Earnings/stock relation measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai asset pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi ataupun laba dalam nilai asset- *stock return* tetap berusaha untuk melaporkannya sesuai dengan waktunya. Untuk menyediakan estimasi dari konservatisme, Basu (1997) dalam Sari dan Adhariani (2008) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena salah satu definisi konservatisme menyebutkan bahwa kejadian yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan harus segera diakui sehingga mengakibatkan kabar buruk lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan kabar baik. Ia memprediksi bahwa pengembalian saham dan *earnings* cenderung merefleksikan kerugian dalam periode yang sama, tetapi pengembalian saham merefleksikan keuntungan lebih cepat daripada *earnings*. Basu (1997) meregres laba tahunan pada return saham tahunan yang sama:

$$NI = \beta_0 + \beta_1 NEG + \beta_2 RET + \beta_3 RET * NEG +$$

NI : laba bersih sebelum *extraordinary item* dibagi dengan nilai pasar ekuitas pada awal tahun

RET : return saham

NEG : variable indikator, bernilai satu jika RET negatif dan bernilai nol jika RET positif

β_2 : mengukur ketepatan waktu dari laba dengan respon terhadap return positif (*goodnews*)

β_3 : mengukur ketepatan waktu dari laba incremental dengan respon terhadap return negatif (*badnews*)

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

- Wardhani (2008) menguji tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme *Corporate Governance*, dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2003-2006, penelitian ini memberikan hasil keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme. Semakin tinggi proporsi komisaris independen terhadap jumlah komisaris maka semakin besar tingkat konservatisme akuntansi. Semakin tinggi kepemilikan oleh dewan maka semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi.
- Fana (2007) menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penilaian ekuitas perusahaan yang dimodernisasi oleh *Good Corporate Governance* pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2002-2005. Hasil penelitian menunjukkan akuntansi konservatisme berpengaruh secara positif secara signifikan terhadap penilaian perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang dapat menginteraksi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan pengaruhnya negatif. Kepemilikan manajerial tidak dapat menginteraksi hubungan konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan.

- Ahmed dan Duellman (2007) menguji pengaruh karakteristik dewan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan *inside directors* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan *outside directors* berhubungan positif terhadap konservatisme akuntansi. Ukuran perusahaan yang diukur dengan ukuran akrual tidak mempunyai pengaruh dengan konservatisme.
- Widyaningrum (2008) menguji pengaruh kepemilikan manajerial, *leverage*, dan risiko *litigasi* terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, dan risiko *litigasi* juga berpengaruh negatif sedangkan ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
- Almilia (2004) mengkaji pengujian *size hypothesis* dan *debt/equity hypothesis* yang mempengaruhi tingkat konservatisme laporan keuangan perusahaan dengan teknik analisis *multinomial logit*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur dan perusahaan nonmanufaktur (kecuali perbankan) yang terdaftar di BEJ pada tahun 1999-2002. Hasil penelitian ini adalah semakin kecil size perusahaan maka semakin besar probabilitas perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung konservatif. Semakin tinggi *debt to total assets ratio* maka semakin besar probabilitas perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung tidak konservatif atau optimis.

2.9 Pengembangan Hipotesis

Komisaris independen merupakan bagian dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan

pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Komisaris independen dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya.

Penelitian Lara, Osma, Penalva (2005) pada listed firms di Spanyol menunjukkan bahwa komisaris independen melakukan sistem pemantauan yang intensif dan menuntut laporan keuangan yang lebih berkualitas. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas sehingga mereka akan mensyaratkan tingkat konservatisme yang tinggi. Dengan demikian konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Ha1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap praktik konservatisme akuntansi.

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004). Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi pemantauan dari dewan dalam perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007) sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan secara tidak langsung dapat menuntut adanya informasi yang transparan dari pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan

institusional ini maka semakin besar pula pemantauan yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya informasi yang transparan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka dapat mendorong pihak manajemen perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang konservatif. Dalam penelitian yang dilakukan Ahmed dan Duellman (2007) menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara persentase *inside directors* dalam dewan dengan konservatisme dan hubungan positif antara persentase kepemilikan oleh *outside directors* dan konservatisme. Sedangkan penelitian Faizal (2004) menjelaskan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Ha2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik konservatisme akuntansi.

Rasio *leverage* menggambarkan struktur modal perusahaan. Dimana struktur modal adalah perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 2001 dalam Dewi, 2004). Semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha melaporkan laba sekarang lebih tinggi yang dapat dilakukan dengan cara mengurangi biaya-biaya yang ada. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi yang konservatif. Hal ini karena semakin tinggi tingkat *leverage*, maka semakin besar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatif (Ahmed dan Duellman, 2007). Widyaningrum (2008) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan, dalam penelitian Rahmawati (2010) menjelaskan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat

konservatisme akuntansi. Hasil penelitian Almilia (2004) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio hutang maka semakin besar *probabilitas* perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung tidak konservatif atau optimis.

Ha3 : Tingkat *leverage* berpengaruh negatif terhadap praktik konservatisme akuntansi.

Pada umumnya manajer melakukan penurunan laba dikarenakan untuk meminimalkan risiko politik berupa biaya-biaya politik. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi tingkat biaya politik yang dihadapi perusahaan sehingga akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif (Wardhani, 2008). Yang dimaksud biaya politik disini yaitu pajak yang dikenakan perusahaan oleh pemerintah, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka pajak yang ditanggung semakin besar pula sehingga hal ini akan mempengaruhi penggunaan prinsip akuntansi yang konservatif pula.

Perusahaan berukuran besar mempunyai laba tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah akan terdorong untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar akan cenderung melaporkan laba rendah secara relatif permanen dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. Dengan demikian maka laba yang dilaporkan akan menjadi lebih kecil sehingga pajak yang harus dibayar semakin kecil pula. Hasil penelitian Almilia (2004) menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin besar *probabilitas* perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang cenderung konservatif. Sedangkan, dalam penelitian Fitri Rahmawati (2010) menjelaskan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Ha4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik konservatisme akuntansi.

